



# Kajian Isu Pemekaran di Kota Medan: Tinjauan Berdasarkan Kondisi Ketimpangan Wilayah

**Cynthia Mutiara Pasaribu<sup>1</sup>**

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Artikel Masuk : 21 September 2015

Artikel Diterima : 22 Oktober 2015

Publikasi Online : 30 Desember 2015

**Abstrak:** Pada umumnya ketimpangan antar wilayah dan inter wilayah muncul karena hasil beberapa konsentrasi, aglomerasi, faktor eksternal, globalisasi, faktor internal, pengelompokan, pertumbuhan yang kritis/kutub pembangunan, keterlibatan institusi dalam kehidupan ekonomi. Pembangunan di Kota Medan pada awalnya memang mengalami pengkonsentrasian pada beberapa kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan. Berdasarkan RPJP Kota Medan tahun 2006-2025, dikemukakan bahwa kebijakan pembangunan Kota Medan belum memperhatikan ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antara kawasan utara dan kawasan selatan di Kota Medan menjadi sebuah permasalahan yang memunculkan isu pemekaran untuk keempat kecamatan di bagian utara Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi ketimpangan ekonomi, sosial kependudukan dan pelayanan infrastruktur di Kota Medan terkait kemunculan isu pemekaran. Analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif menggunakan skoring, analisis korelasi, analisis crosstab serta verifikasi hasil analisis statistik menggunakan wawancara. Analisis statistik deskriptif menghasilkan indeks ekonomi wilayah, sosial kependudukan dan pelayanan infrastruktur untuk setiap kecamatan di Kota Medan yang menjelaskan perbedaan pembangunan. Hasil dari analisis korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara kondisi ketimpangan dan kemunculan isu pemekaran. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa indeks kecamatan dibagian utara dengan kategori sedang sedangkan semua kecamatan di bagian selatan dengan kategori baik. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara kondisi ketimpangan dengan kemunculan isu pemekaran Medan Utara. Hasil analisis crosstab menunjukkan bahwa variabel sarana pendidikan (SMA), kepadatan penduduk, dan tenaga kerja menjadi variabel yang menunjukkan kondisi ketimpangan secara signifikan.

**Kata Kunci:** Ekonomi Wilayah, Ketimpangan, Pelayanan Infrastruktur, Pemekaran Wilayah, Sosial Kependudukan

**Abstract:** Generally, disparities between regions and inter-regions happened because of concentration, agglomeration, external factors, globalization, internal factor, grouping, critical growth or polar development, institution involvement in economic activities. Initially development in Medan concentrated in several sub districts as the center of government and

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang  
Email: [cynthia.pasaribu@gmail.com](mailto:cynthia.pasaribu@gmail.com)

*trade activities. Based on long-term development plan of Medan 2006-2025, stated that development policy in Medan not notice of the regional gap. Disparities development between north and south of Medan are the problems for segregation issue at fourth sub-districts in the northern part of Medan. The purpose of this research is to analyze the gap condition in economic, social demography and the infrastructure's service in Medan related to the emergence of segregation issue in North Medan. The analysis that used in research is descriptive statistic analysis, analysis of statistical correlation, crosstab analysis, and verification of statistic results using interview method so that at the end of the research will be generated economic, social demography and infrastructure services index for every sub-district in the Medan to know the development difference. The result of correlation analysis shows that there was a correlation between disparity and segregation issue. Descriptive analysis produce the index for 4 sub districts in north side have the medium category while 17 sub districts in the south have a good category. Crosstab analysis shows that there is a correlation between disparities condition and the emergence of segregation issue. Crosstab analysis also shows that variable education facilities (senior high school), population density, and labor variables show the disparity condition significantly.*

**Keywords:** *Regional Economy, Disparity, Infrastructure Service, Regional Segregation, Social Demography*

## Pendahuluan

Pembangunan berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Selain bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2003). Pembangunan seharusnya menciptakan kesejahteraan bagi semua penduduk, walaupun wajar jika terjadi pemusatan pada wilayah tertentu. Namun pemusatan semestinya bisa memberikan efek yang positif bagi wilayah sekitarnya sehingga tidak memunculkan ketimpangan interwilayah. Kondisi ketimpangan sering dilihat dari aspek ekonomi. Selain dari kegiatan perekonomian, ketimpangan akan terlihat dari kondisi fisik daerah seperti kondisi jalan, ketersediaan listrik, telekomunikasi, kondisi permukiman masyarakat. Menurut Mopangga (2011), ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Hasil penelitian Khairunnisa & Hidayat (2015) mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian ketimpangan ekonomi diperlukan kebijakan pemerintah agar dapat berfokus pada sektor unggulan, dominan dan berpotensi tumbuh dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia. Nurhuda, Muluk & Prasetyo (2013) juga mengungkapkan bahwa PAD dan IPM yang semakin tinggi dan terdistribusi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan ketimpangan pembangunan. Pemerintah pusat juga perlu mengalokasikan PDRB secara merata ke seluruh sektor ekonomi sehingga masing-masing sektor dapat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Santosa, 2015). Rokhman (2012) menambahkan bahwa pemerintah juga perlu melakukan pembangunan berorientasi pada pemerataan dan mendorong terciptanya lapangan kerja dimana masyarakat juga didorong untuk dapat menciptakan usahanya sendiri sehingga menambah perekonomian masyarakat. Dalam kasusnya di negara Cina, Demurger (2001) mengungkapkan bahwa transportasi dan prasarana telekomunikasi akan memacu pertumbuhan wilayah dan memecah gap yang memicu ketimpangan wilayah.

Kota Medan merupakan kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki disparitas pendapatan paling tinggi yakni dengan nilai rata-rata Indeks Williamson 0,5383 (BPS Kota

Medan, 2010). Dibandingkan dengan indeks Williamson Kota Makassar yaitu 0,49 (Midadan, 2015), maka ketimpangan di Kota Medan lebih buruk. Pembangunan di selatan Kota Medan lebih diprioritaskan karena adanya pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, serta pendidikan. Pada akhirnya ketimpangan antara utara dan selatan di Kota Medan menjadi sebuah permasalahan yang memunculkan isu pemekaran untuk keempat kecamatan di bagian utara yaitu, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Belawan yang menimbulkan kondisi kehidupan yang sudah meresahkan masyarakat sehingga muncul wacana untuk memekarkan diri dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.

Pemekaran di Medan Utara sudah menjadi isu yang berkembang di masyarakat. Beberapa tim kepanitian yang memprakarsai dan menyusun persiapan pemekaran Medan Utara telah dibentuk oleh masyarakat Medan Utara yaitu Tim Rotasi Pemrakarsa Medan Utara, Panitia Persiapan Pembentukan Pemerintahan Kota Medan Utara (P4KMU), Tim 17 Pemekaran Medan Utara dan Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU). Sehingga timbul pertanyaan penelitian apakah ada hubungan antara kondisi ketimpangan pembangunan terkait munculnya isu pemekaran di Kota Medan. Ketimpangan pembangunan dilihat dari aspek ekonomi daerah, sosial kependudukan dan pelayanan infrastruktur. Jadi, apakah kondisi ekonomi, sosial kependudukan, dan pelayanan infrastruktur di kecamatan-kecamatan yang berada di bagian utara lebih buruk dibandingkan dengan kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Medan? Dan apakah ada keterkaitan antara kondisi ketimpangan pembangunan dengan kemunculan isu pemekaran?

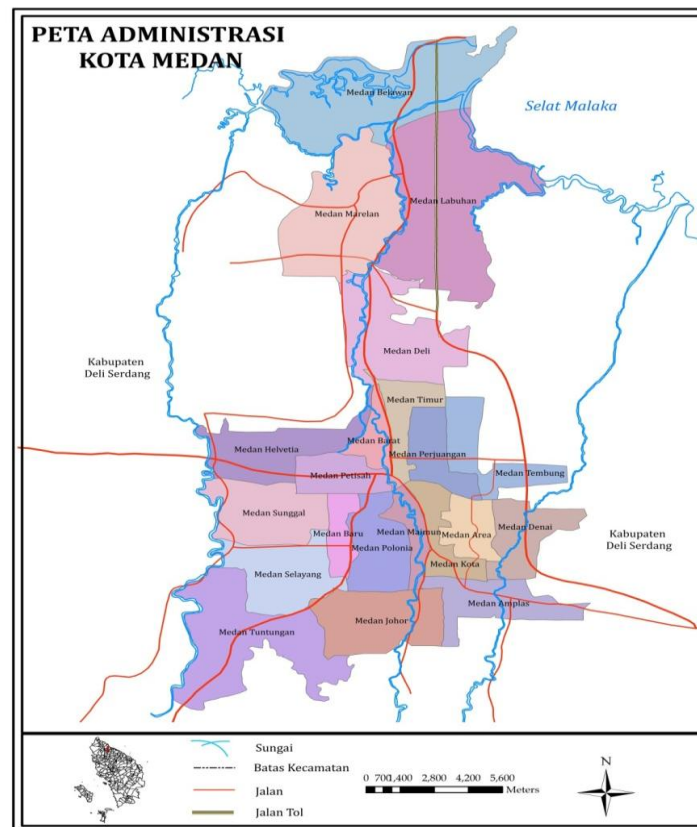
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi ketimpangan pembangunan di Kota Medan terkait dengan kemunculan isu pemekaran Medan Utara. Adapun sasaran penelitian adalah:

- Menganalisis kondisi ketimpangan aspek ekonomi wilayah;
- Menganalisis kondisi ketimpangan aspek sosial kependudukan;
- Menganalisis kondisi ketimpangan aspek pelayanan infrastruktur;
- Mengkaji hubungan kondisi ketimpangan ekonomi, infrastruktur dan sosial kependudukan dengan kemunculan isu pemekaran daerah di Kota Medan.

Ruang lingkup wilayah studi penelitian adalah Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan. Kota Medan memiliki luas 265,10 km<sup>2</sup>. Peta administrasi wilayah studi tergambar di gambar 1.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel tersebut biasanya diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2013).



*Sumber: Badan Informasi Geografis, 2012*

**Gambar 1. Wilayah Studi**

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder dan primer.

- Teknik Pengumpulan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan survey instansi, kajian literatur, telaah dokumen;
- Teknik Pengumpulan Data Primer. Teknik pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpulan dimana informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber primer, yaitu peneliti langsung terjun mencatat kejadian-kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi lapangan.

### ***Teknik Analisis data***

Analisis penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, analisis crosstab serta ada verifikasi dengan wawancara yang terjabarkan sebagai berikut:

### ***Analisis Statistik Deskriptif***

Statistik deskriptif adalah penyajian data statistik secara numerik, menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel (Sugianto, 2012). Indeks adalah suatu tipe pengukuran yang merangkum dan meranking beberapa observasi yang spesifik dan menampilkan kembali dalam suatu bentuk dimensi yang lebih umum.

Sedangkan skala adalah suatu tipe pengukuran yang terdiri dari beberapa hal yang memiliki struktur yang logis diantaranya (Dwiastuti, 2012). Setiap variabel akan dilakukan penilaian dengan skala sebagai berikut:

- 5 = Sangat baik, nilai >81% dari nilai rata-rata/besaran;
- 4 = Baik, nilai 61%-80% dari nilai rata-rata/besaran;
- 3 = Cukup, nilai 41% - 60% dari nilai rata-rata/besaran;
- 2 = Buruk, nilai 21% - 40% dari nilai rata-rata/besaran;
- 1 = Sangat Buruk, <20% dari nilai rata-rata/besaran.

Penggunaan skor akan dilakukan secara berbeda untuk data tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, migrasi keluar, permukiman kumuh, tenaga kerja:

- 5 = Sangat baik , nilai <20% dari nilai rata-rata/besaran;
- 4 = Baik, nilai 21%-40% dari nilai rata-rata/besaran;
- 3 = Cukup, nilai 41% - 60% dari nilai rata-rata/besaran;
- 2 = Buruk , nilai 61% - 80% dari nilai rata-rata/besaran;
- 1 = Sangat Buruk, >80% dari nilai rata-rata/besaran.

Setelah nilai untuk setiap indikator didapatkan maka akan dilakukan penilaian dari hasil skoring untuk bisa menentukan daerah perlu dimekarkan atau belum. Dimana akan dibandingkan nilai seluruh indikator di masing-masing kecamatan dengan nilai terbaik, sehingga didapatkan nilai indeks setiap kecamatan dari rentang 0 - 1.

#### **Analisis Korelasi**

Analisis korelasi adalah studi pembahasan tentang derajat keeratan hubungan antarvariabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan antara variabel bebas dan variable terikat. Pada penelitian ini variabel bebas adalah kondisi ketimpangan yang digambarkan dengan ekonomi wilayah, sosial kependudukan, dan pelayanan infrastruktur. Sedangkan variabel terikatnya adalah wilayah yang diwacanakan untuk dimekarkan. Data variabel bebas yang merupakan data nominal, maka jenis analisis korelasi yang dilakukan adalah analisis korelasi rank spearman. Besarnya hubungan yang mengukur korelasi spearman disebut koefisien korelasi berpangkat atau korelasi spearman yang dinyatakan dengan lambang  $r_s$ . Analisis ini akan menggunakan aplikasi SPSS untuk memudahkan proses pengolahan data.

Ho = Tidak ada hubungan antara kondisi ketimpangan (ekonomi wilayah, sosial kependudukan, dan pelayanan infrastruktur) dengan munculnya isu pemekaran Medan Utara.

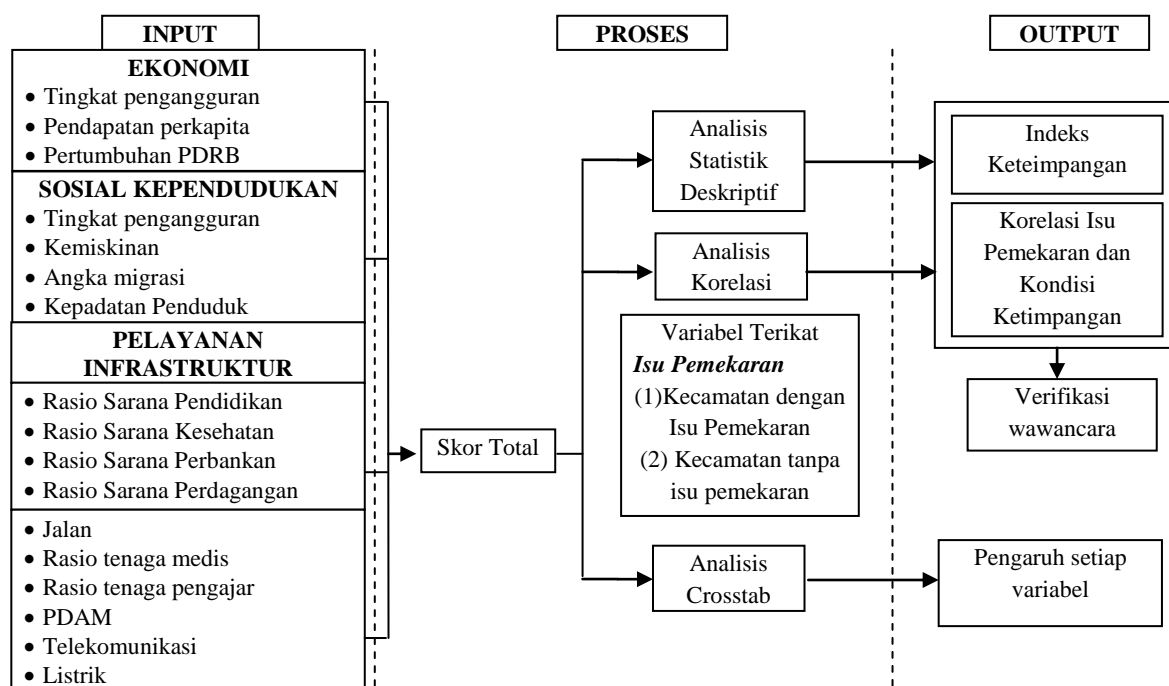
H1 = Adanya hubungan antara kondisi ketimpangan (ekonomi wilayah, sosial kependudukan, dan pelayanan infrastruktur) dan munculnya isu pemekaran Medan Utara

Dimana kriteria pengambilan keputusan adalah (Usman, 2008):

- Jika nilai  $r_s \text{ hitung} \leq r_s \text{ tabel}$  , maka Ho diterima atau korelasi tidak signifikan.
- Jika nilai  $r_s \text{ hitung} \geq r_s \text{ tabel}$ , maka H1 diterima dan korelasi signifikan.

#### **Analisis Crosstab**

Metode *crosstabs* (tabulasi silang) merupakan metode yang menggunakan uji statistik untuk mengidentifikasi dan mengetahui korelasi antara dua variabel. Statistik *Crosstab* digunakan untuk mengetahui hubungan/distribusi respon antara variable data dalam bentuk baris dan kolom.

**Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian**

### Hasil Penelitian

Analisis kondisi ketimpangan mencakup aspek ekonomi, sosial kependudukan, dan pelayanan infrastruktur. Adapun penjelasannya adalah:

#### *Kondisi Ketimpangan di Kota Medan*

Aspek ekonomi mencakup variabel PDRB, pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor primer.

**Tabel 1. Indeks Ketimpangan Aspek Ekonomi**

No.	Kecamatan	Indeks	Keterangan
1.	Medan Tuntungan	0.43	Sedang
2.	Medan Johor	0.37	Sedang
3.	Medan Amplas	0.83	Baik
4.	Medan Denai	0.50	Sedang
5.	Medan Area	0.63	Sedang
6.	Medan Kota	0.87	Baik
7.	Medan Maimun	0.87	Baik
8.	Medan Polonia	1.00	Baik
9.	Medan Baru	0.87	Baik
10.	Medan Selayang	0.37	Sedang
11.	Medan Sunggal	0.50	Sedang
12.	Medan Helvetia	0.73	Baik
13.	Medan Petisah	0.93	Baik
14.	Medan Barat	0.60	Sedang
15.	Medan Timur	0.90	Baik
16.	Medan Perjuangan	0.47	Sedang

No.	Kecamatan	Indeks	Keterangan
17.	Medan Tembung	0.63	Sedang
18.	Medan Deli	0.87	Baik
19.	Medan Labuhan	0.20	Buruk
20.	Medan Marelan	0.33	Buruk
21.	Medan Belawan	0.87	Baik

Kategori penilaian indeks sebagai berikut :

0 – 0,33 = Buruk;  
 0,34 – 0,66 = Sedang;  
 0,67 – 1 = Baik.

Aspek kependudukan mencakup variabel kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, migrasi penduduk.

**Tabel 2. Indeks Ketimpangan Sosial Kependudukan**

No.	Kecamatan	Indeks	Keterangan
1.	Medan Tuntungan	0.53	Sedang
2.	Medan Johor	0.60	Sedang
3.	Medan Amplas	0.47	Sedang
4.	Medan Denai	0.60	Sedang
5.	Medan Area	0.63	Sedang
6.	Medan Kota	0.67	Baik
7.	Medan Maimun	0.63	Sedang
8.	Medan Polonia	0.63	Sedang
9.	Medan Baru	0.73	Baik
10.	Medan Selayang	0.53	Sedang
11.	Medan Sunggal	0.60	Sedang
12.	Medan Helvetia	0.63	Sedang
13.	Medan Petisah	0.70	Baik
14.	Medan Barat	0.67	Baik
15.	Medan Timur	0.60	Sedang
16.	Medan Perjuangan	0.57	Sedang
17.	Medan Tembung	0.60	Sedang
18.	Medan Deli	0.53	Sedang
19.	Medan Labuhan	0.47	Sedang
20.	Medan Marelan	0.40	Sedang
21.	Medan Belawan	0.40	Sedang

Aspek infrastruktur meliputi variabel sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perbankan, sarana perdagangan, air bersih, listrik, dan permukiman kumuh.

**Tabel 3. Indeks Ketimpangan Aspek Infrastruktur**

No.	Kecamatan	Indeks	Keterangan
1.	Medan Tuntungan	0.83	Baik
2.	Medan Johor	0.81	Baik
3.	Medan Amplas	0.71	Baik
4.	Medan Denai	0.70	Baik
5.	Medan Area	0.83	Baik
6.	Medan Kota	0.90	Baik
7.	Medan Maimun	0.79	Baik

No.	Kecamatan	Indeks	Keterangan
8.	Medan Polonia	0.78	Baik
9.	Medan Baru	0.80	Baik
10.	Medan Selayang	0.84	Baik
11.	Medan Sunggal	0.80	Baik
12.	Medan Helvetia	0.74	Baik
13.	Medan Petisah	0.87	Baik
14.	Medan Barat	0.77	Baik
15.	Medan Timur	0.82	Baik
16.	Medan Perjuangan	0.74	Baik
17.	Medan Tembung	0.82	Baik
18.	Medan Deli	0.62	Sedang
19.	Medan Labuhan	0.71	Baik
20.	Medan Marelan	0.59	Sedang
21.	Medan Belawan	0.62	Sedang

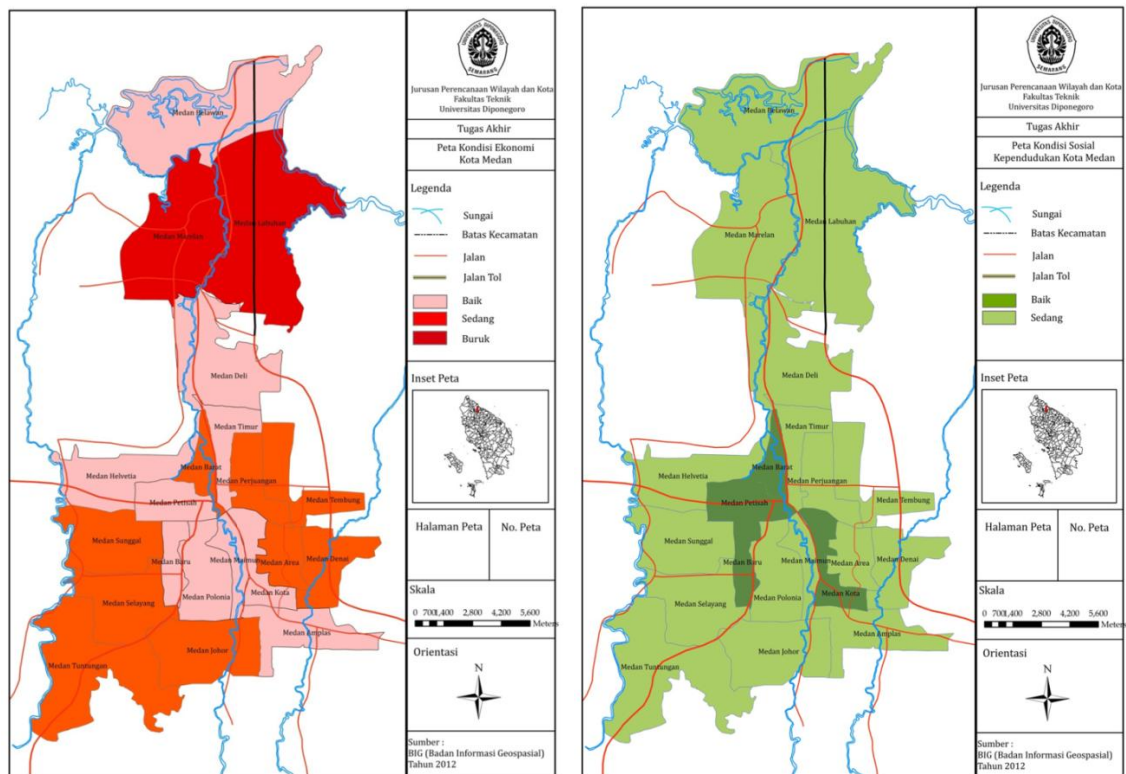
Indeks total merupakan akumulasi dari indeks ekonomi, indeks sosial kependudukan dan indeks infrastruktur untuk menjadi nilai indeks akhir dari setiap kecamatan di Kota Medan.

**Tabel 4. Indeks Ketimpangan Total**

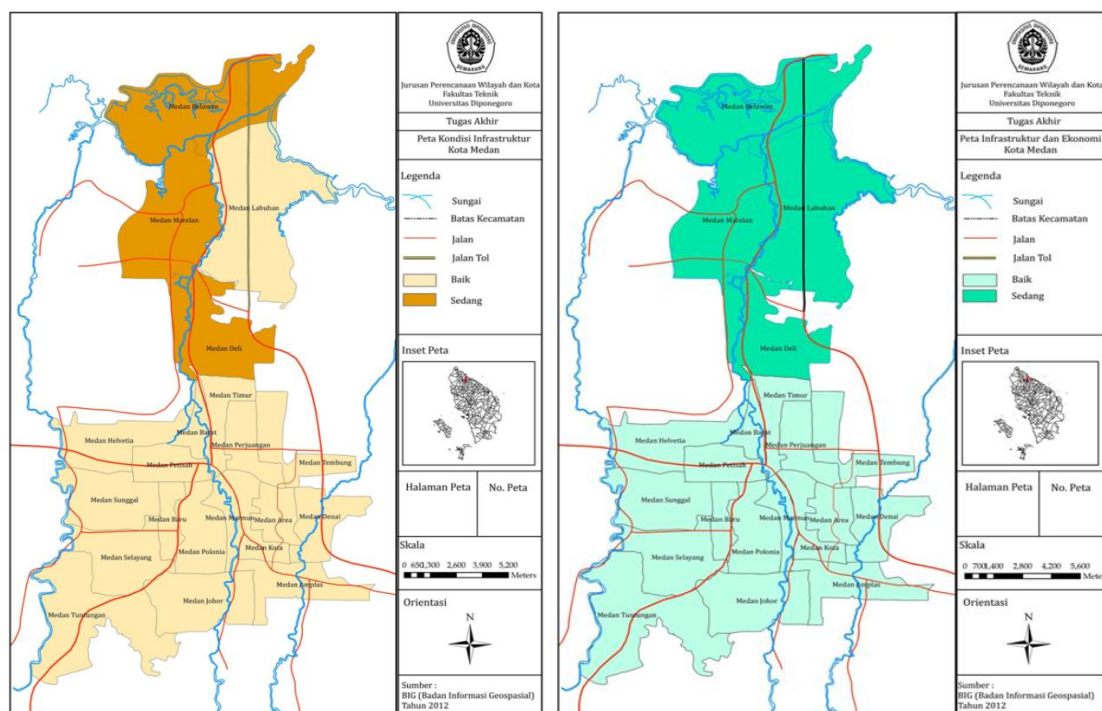
No.	Kecamatan	Indeks	Keterangan
1	Medan Tuntungan	0.73	Baik
2	Medan Johor	0.71	Baik
3	Medan Amplas	0.72	Baik
4	Medan Denai	0.67	Baik
5	Medan Area	0.79	Baik
6	Medan Kota	0.88	Baik
7	Medan Maimun	0.81	Baik
8	Medan Polonia	0.81	Baik
9	Medan Baru	0.83	Baik
10	Medan Selayang	0.72	Baik
11	Medan Sunggal	0.73	Baik
12	Medan Helvetia	0.75	Baik
13	Medan Petisah	0.87	Baik
14	Medan Barat	0.74	Baik
15	Medan Timur	0.82	Baik
16	Medan Perjuangan	0.68	Baik
17	Medan Tembung	0.77	Baik
18	Medan Deli	0.66	Sedang
19	Medan Labuhan	0.57	Sedang
20	Medan Marelan	0.51	Sedang
21	Medan Belawan	0.64	Sedang

Berikut ini peta yang menggambarkan persebaran indeks ekonomi, sosial kependudukan, pelayanan infrastruktur dan total di Kota Medan.





**Gambar 3. Peta Indeks Ekonomi dan Sosial Kependudukan**



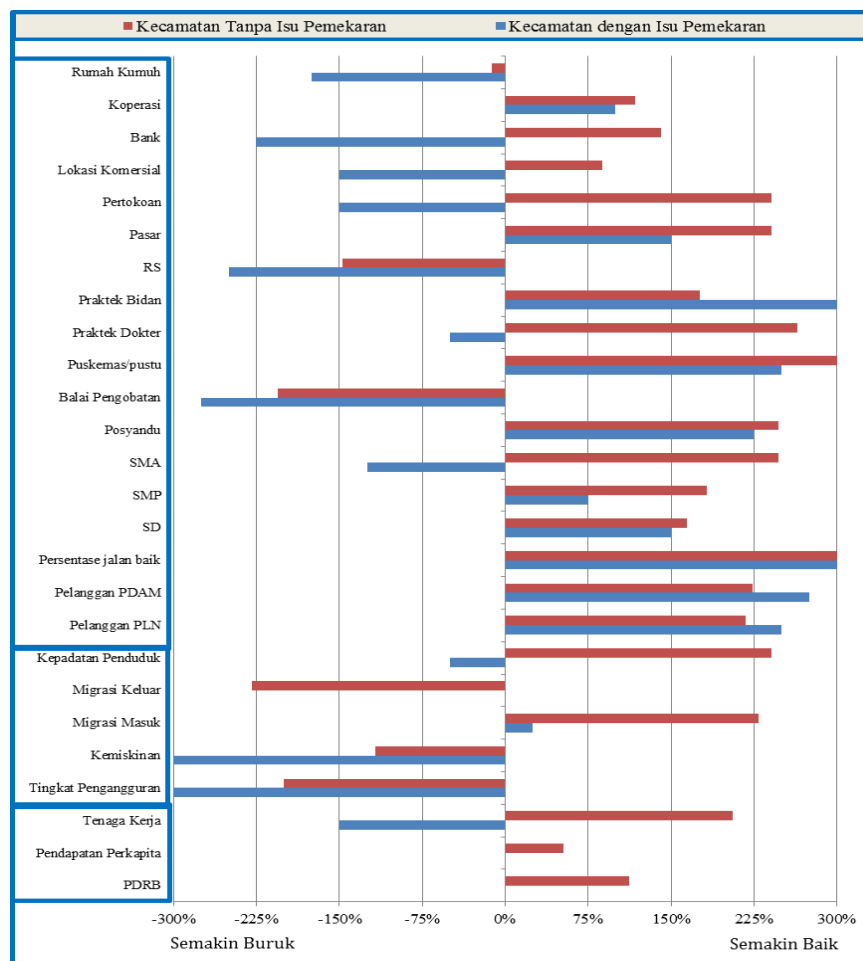
**Gambar 4. Peta Indeks Infrastruktur dan Indeks Total**

### ***Hubungan Kondisi Ketimpangan dan Isu Pemekaran***

Nilai  $r_s \text{ hitung} \geq r_s \text{ tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan korelasi signifikan. Nilai koefisien korelasi spearman tabel dengan tingkat kesalahan 0,05,  $n = 21$  adalah 0,435, sehingga: Jika nilai  $r_s \text{ hitung} \geq r_s \text{ tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan korelasi signifikan =  $0,681 \geq 0,435$ , sehingga ada hubungan antara kondisi ketimpangan infrastruktur, sosial kependudukan dan ekonomi dengan kemunculan wacana isu pemekaran wilayah di Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis korelasi, terdapat kaitan antara kondisi ketimpangan dengan kemunculan isu pemekaran Medan Utara. Namun, jika lebih diteliti setiap variabel akan diketahui bahwa kondisi ketimpangan yang berdampak besar terhadap kemunculan isu pemekaran adalah variabel infrastruktur daerah dan variabel sosial kependudukan. Sedangkan variabel ekonomi belum bisa menjadi penjelas kemunculan isu pemekaran Medan Utara secara signifikan. Berdasarkan analisis korelasi didapatkan bahwa terdapat kondisi ketimpangan yang berkaitan dengan kemunculan isu pemekaran Medan Utara.

### ***Pengaruh Variabel***

Pengaruh variabel akan menjelaskan bagaimana setiap variabel menunjukkan kondisi ketimpangan di Kota Medan.



**Gambar 5. Persentase Pengaruh Variabel**

### ***Tanggapan Pemerintah***

Berdasarkan dengan hasil wawancara pihak Pemko Medan menyatakan bahwa kondisi ketimpangan pembangunan memang terjadi di Kota Medan. Dimana daerah di bagian utara memiliki pembangunan yang tidak begitu pesat dibandingkan dengan daerah di bagian selatan. Kondisi ketimpangan yang sangat terlihat adalah dari segi infrastruktur, dinyatakan memang banyak infrastruktur di kecamatan di bagian utara yang lebih minim. Selain itu, SDM yang ada di Medan Utara dinyatakan kurang memiliki kemampuan dan keahlian sehingga dapat bersaing. Sehingga banyak ditemui masyarakat miskin di daerah ini. Namun hal ini sudah mulai disadari oleh pemerintah Kota Medan dan berusaha untuk memperbaikinya dengan disusunnya rencana daerah yang mendukung pembangunan di Medan Utara. Dana pembangunan juga sudah di tingkatkan agar pembangunan lebih merata.

Wawancara dengan pihak Bappeda Kota Medan, menyatakan bahwa kondisi ketimpangan secara infrastruktur memang ada. Namun Bappeda berusaha untuk meningkatkan kondisi pelayanan infrastruktur dengan menyusun rencana pembangunan yaitu membuat pusat pelayanan kota di bagian utara yaitu di Medan Labuhan. Pusat pelayanan kota yang baru ini diharapkan bisa menjadi solusi pembangunan di Medan Utara. Pusat pelayanan kota ini berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa regional, pusat pelayanan transportasi, kegiatan sosial budaya, pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan nasional.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

#### ***Kesimpulan***

Indeks yang menunjukkan kondisi ketimpangan yang signifikan adalah aspek ekonomi dimana masih terdapat dua kecamatan yang memiliki kondisi buruk, yaitu Medan Labuhan dan Medan Marelan. Indeks ketimpangan dari aspek sosial kependudukan juga menunjukkan angka relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Medan Belawan dan Medan. Indeks infrastruktur di Kota Medan sebagian besar dalam kategori sedang, hanya beberapa kecamatan yang dikategorikan baik. Jika dikaitkan dengan tanggapan pemerintah yang menganggap kondisi ketimpangan yang sangat signifikan yaitu kondisi infrastruktur maka hal ini menjadi kurang sesuai. Karena hampir 90% kecamatan berada di kategori sedang untuk kondisi infrastruktur.

Sehingga muncul pemikiran bahwa kondisi dari alam maupun SDM yang relatif unik untuk kecamatan di bagian utara Kota Medan. Dari segi SDA, daerah ini berada langsung berbatasan dengan laut, kondisi ini rawan akan bencana banjir rob, banyaknya sungai-sungai yang tempat tinggal maupun sarana transportasi masyarakat nelayan, lahan yang berdekatan dengan laut mengindikasikan kesuburan lahan yang tidak begitu baik. Selain itu hal yang membedakan dengan kecamatan yang berada di selatan, dimana penduduk sudah memiliki keahlian tertentu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri mulai dari industri membuat kue oleh-oleh khas Kota Medan, pembuatan perabotan rumah tangga, pengolahan kopi, pembuatan sepatu, dan lainnya. Hasil analisis korelasi memperkuat bahwa terdapat korelasi antara kondisi ketimpangan dengan kemunculan isu pemekaran Medan Utara. Kondisi yang relatif kurang baik dari segi ekonomi, pelayanan infrastruktur maupun sosial kependudukan di keempat kecamatan yang tersebar di bagian utara Kota Medan mempengaruhi kemunculan isu pemekaran.

### Rekomendasi

- a) Segi Ekonomi
  - Memberikan perhatian khusus pada rencana pembangunan pusat pelayanan kota yang direncanakan dibangun di Medan Labuhan agar pusat pelayanan kota yang baru ini dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kegiatan perekonomian masyarakat;
  - Mendistribusikan pusat-pusat kegiatan di Kota Medan lebih merata.
- b) Segi Sosial Kependudukan
  - Meningkatkan keahlian bagi kaum muda untuk bias berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah dengan melalui pembinaan secara formal maupun informal.
- c) Segi Infrastruktur
  - Menyediakan fasilitas dan bantuan agar masyarakat yang bekerja di sektor primer dapat bekerja dan kebutuhan hidup mereka tetap bisa tercukupi;
  - Pemerintah memperhatikan penyediaan sarana-sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti sarana perdagangan dan perbankan untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan perekonomian;
  - Memprioritaskan program revitalisasi permukiman kumuh yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Medan.

### Daftar Pustaka

- BPS Kota Medan. (2010). *Kota Medan dalam angka 2010*. Medan: BPS Kota Medan.
- Creswell, J. (2013). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demurger, S. (2001). Infrastructure development and economic growth: an explanaton for regional disparities in China? *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 95-117. doi:10.1006/jcec.2000.1693.
- Dwiastuti, R. (2012). *Metode penelitian sosial: Rancangan instrumen penelitian*. Modul Kuliah Fakultas Agrikultur Universitas Brawijaya, Malang International Daylight Monitoring Programme. Retrieved from <http://idmp.entpe.fr/>.
- Khairunnisa, A. & Hidayat, P. (2015). Analisis disparitas pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(6), 448-463.
- Midadan, M. (2015). *Dana perimbangan dan alokasi belanja modal serta implikasinya terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi Program Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Makasar).
- Mopangga, H. (2011). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika*, 10(1), 40-51.
- Nurhuda, R., Muluk, M.R.K. & Prasetyo, W.Y. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan (Studi Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)M* 1(4), 110-119.
- Rokhman, W. (2012). Analisis disparitas pendapatan kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1). doi:10.15294/edaj.v1i1.327.
- Santosa, S. H. (2015). Disparitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur. *Media Trend*, 10(2), 116-128.
- Sugianto, M. (2012). *Mengolah data bisnis dengan SPSS 20*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Syahwie, M. (2013). Ketimpangan pendapatan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Informasi*, 10(2), 95-104.
- Todaro, M. P. & dan Smith, S. C. (2003). *Pembangunan ekonomi dunia ketiga* (Wisnu C. Kristiaji, Trans.). Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, Erlangga.
- Usman, H. & Akbar, P.S. (2008). *Pengantar statistika* (Edisi kedua). Jakarta: Bumi Aksara.